BAB III
METODOLOGI

3.1 Penjelasan Umum

3.1.1 Apa yang Dimaksud dengan PDRB?

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau non-residen. Penyusunan PDRB dapat dilakukan melalui 3 (tiga) pendekatan yaitu pendekatan produksi, pengeluaran, dan pendapatan yang disajikan atas dasar harga berlaku dan harga konstan.

PDRB atas dasar harga berlaku atau dikenal dengan PDRB nominal disusun berdasarkan harga yang berlaku pada periode penghitungan, dan bertujuan untuk melihat struktur perekonomian. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan disusun berdasarkan harga pada tahun dasar dan bertujuan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi.

3.1.2 Mengapa Tahun Dasar PDRB Perlu Diubah?

Selama sepuluh tahun terakhir, banyak perubahan yang terjadi pada tatanan global dan lokal yang sangat berpengaruh terhadap perekonomian nasional. Krisis finansial global yang terjadi pada tahun 2008, penerapan perdagangan bebas antara China-ASEAN (CAFTA), perubahan sistem pencatatan perdagangan internasional dan meluasnya jasa layanan pasar modal merupakan contoh perubahan yang perlu diadaptasi dalam mekanisme pencatatan statistik nasional.

Salah satu bentuk adaptasi pencatatan statistik nasional adalah melakukan perubahan tahun dasar PDB Indonesia dari tahun 2000 ke 2010.

Perubahan tahun dasar PDB dilakukan seiring dengan mengadopsi rekomendasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang tertuang dalam 2008 *System of National Accounts* (SNA 2008) melalui penyusunan kerangka *Supply and Use Tables* (SUT).

Perubahan tahun dasar PDB dilakukan secara bersamaan dengan penghitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi untuk menjaga konsistensi hasil penghitungan.

3.1.3 Apa yang Dimaksud SNA 2008?

SNA 2008 merupakan standar rekomendasi internasional tentang cara mengukur aktivitas ekonomi yang sesuai dengan penghitungan konvensional berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi. Rekomendasi yang dimaksud dinyatakan dalam sekumpulan konsep, definisi, klasifikasi, dan aturan neraca yang disepakati secara internasional dalam mengukur *item* tertentu seperti PDRB.

SNA dirancang untuk menyediakan informasi tentang aktivitas pelaku ekonomi dalam hal produksi, konsumsi dan akumulasi harta dan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan analisis, pengambilan keputusan, dan pembuatan kebijakan. Dengan menggunakan kerangka SNA, fenomena ekonomi dapat dengan lebih baik dijelaskan dan dipahami.

3.1.4 Apa Manfaat Perubahan Tahun Dasar?

Manfaat perubahan tahun dasar PDRB antara lain :

- Menginformasikan perekonomian regional yang terkini seperti pergeseran struktur dan pertumbuhan ekonomi;
- Meningkatkan kualitas data PDRB;
- Menjadikan data PDRB dapat diperbandingkan secara internasional.

3.1.5 Apa Implikasi Perubahan Tahun Dasar?

Pergeseran harga tahun dasar akan memberikan beberapa dampak antara lain:

- Meningkatkan nominal PDRB, yang pada gilirannya akan berdampak pada pergeseran kelompok pendapatan suatu daerah dari pendapatan rendah, menjadi menengah, atau tinggi dan pergeseran struktur perekonomian;
- Akan merubah besaran indikator makro seperti rasio pajak, rasio hutang, rasio investasi dan saving, nilai neraca berjalan, struktur dan pertumbuhan ekonomi;
- Akan menyebabkan perubahan pada input data untuk *modeling* dan *forecasting*.

3.1.6 Mengapa Tahun 2010 sebagai tahun dasar?

Badan Pusat Statistik (BPS) telah melakukan perubahan tahun dasar secara berkala sebanyak 5 (lima) kali yaitu pada tahun 1960, 1973, 1983, 1993, dan 2000.

Tahun 2010 dipilih sebagai tahun dasar baru menggantikan tahun dasar 2000 karena beberapa alasan berikut:

- Perekonomian Indonesia tahun 2010 relatif stabil;
- Telah terjadi perubahan struktur ekonomi selama 10 (sepuluh) tahun terakhir terutama dibidang informasi dan teknologi serta transportasi yang berpengaruh terhadap pola distribusi dan munculnya produk-produk baru;
- Rekomendasi PBB tentang pergantian tahun dasar dilakukan setiap 5 (lima) atau 10 (sepuluh) tahun[1];

[1] SNA1993, para 16.76: "*constant price series should not be allowed to run for more than five, or at the most, ten years without rebasing*"

- Adanya pembaharuan konsep, definisi, klasifikasi, cakupan, sumber data dan metodologi sesuai rekomendasi dalam SNA 2008;
- Tersedianya sumber data baru untuk perbaikan PDRB seperti data Sensus Penduduk 2010 (SP 2010) dan Indeks harga produsen (*Producers Price Index* /PPI);
- Tersedianya kerangka kerja SUT yang menggambarkan keseimbangan aliran produksi dan konsumsi (barang dan jasa) dan penciptaan pendapatan dari aktivitas produksi tersebut.

3.1.7 Implementasi SNA 2008 dalam PDRB tahun dasar 2010

Terdapat 118 revisi di SNA 2008 dari SNA sebelumnya dan 44 diantaranya merupakan revisi utama. Beberapa revisi yang diadopsi dalam penghitungan PDRB tahun dasar 2010 diantaranya:

- **Konsep dan Cakupan: Perlakuan *Work-in Progress* (WIP) pada *Cultivated Biological Resources* (CBR)**:

  Merupakan penyertaan pertumbuhan aset alam hasil budidaya manusia yang belum di panen sebagai bagian dari output lapangan usaha yang bersangkutan seperti: nilai tegakan padi yang belum di panen, nilai sapi perah yang belum menghasilkan, nilai pohon kelapa sawit atau karet yang belum berbuah/dipanen.

- **Metodologi** : **Perbaikan metode penghitungan output bank dari *Imputed Bank Services Charge* (IBSC) menjadi *Financial Intermediation Services Indirectly Measured* (FISIM)**

- **Valuasi : Nilai tambah lapangan usaha dinilai dengan Harga Dasar (*Basic Price*).**

  Merupakan harga keekonomian barang dan jasa ditingkat produsen sebelum adanya intervensi pemerintah seperti pajak dan subsidi atas produk. Valuasi

ini hanya untuk penghitungan PDB, sedangkan PDRB menggunakan harga produsen.

- **Klasifikasi :**

  Klasifikasi yang digunakan berdasarkan Internasional Standard Classification (ISIC rev.4) dan Central Product Classification (CPC rev.2). BPS mengadopsi kedua klasifikasi tersebut sebagai Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2009 (KBLI 2009) dan Klasifikasi Baku Komoditi Indonesia 2010 (KBKI 2010).

Perbandingan Perubahan Konsep dan Metode dari SNA sebelumnya dan SNA 2008 antara lain dijelaskan pada Tabel 1.1.

Tabel 3.1.
Perbandingan Perubahan Konsep dan Metode Perhitungan PDRB

Variabel	Konsep Lama	Konsep Baru
1. Output pertanian	Hanya mencakup output pada saat panen	Output saat panen ditambah nilai hewan dan tumbuhan yang belum menghasilkan
2. Metode peng-hitungan output bank komersial.	Menggunakan metode *Imputed Bank Services Charge* (IBSC) .	Menggunakan metode *Financial Intermediary Services Indirectly Measured* (FISIM)
3. Valuasi	Harga Produsen:	Harga Dasar:
4. Biaya eksplorasi mineral dan pembuatan produk original	Dicatat sebagai konsumsi antara	Dicatat sebagai output dan dikapitalisasi sebagai PMTB

3.1.8 Perubahan Klasifikasi dari PDRB Tahun Dasar 2000 ke PDRB Tahun Dasar 2010

Klasifikasi PDRB menurut lapangan usaha tahun dasar 2000 (2000=100) menggunakan Klasifikasi Lapangan Usaha Indonesia 1990 (KLUI 1990)

sedangkan pada PDRB tahun dasar 2010 (2010=100) menggunakan KBLI2009. Perbandingan keduanya pada tingkat paling agregat dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.2.
Perbandingan Perubahan Klasifikasi PDRB
Menurut Lapangan Usaha Tahun Dasar 2000 dan 2010

PDRB Tahun Dasar 2000	PDRB Tahun Dasar 2010
1. Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan	A. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan
2. Pertambangan dan Penggalian	B. Pertambangan dan Penggalian
3. Industri Pengolahan	C. Industri Pengolahan
	D. Pengadaan Listrik dan Gas
4. Listrik, Gas dan Air Bersih	E. Pengadaan Air
	F. Konstruksi
5. Konstruksi	G. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor
6. Perdagangan, Hotel dan Restoran	H. Transportasi dan Pergudangan
	I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
7. Pengangkutan dan Komunikasi	J. Informasi dan Komunikasi
	K. Jasa Keuangan
8. Keuangan, Real estat, dan jasa perusahaan	L. Real Estat
	M,N. Jasa Perusahaan
	O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib
	P. Jasa Pendidikan
9. Jasa-jasa	Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
	R,S,T,U. Jasa Lainnya

3.2 Sumber Data

Data yang digunakan dalam publikasi ini terdiri dari data primer dan sekunder. Data utama/primer berasal dari survei khusus sektoral. Sedang data sekunder berasal dari inventarisasi data sekunder yang berasal dari Dinas/Instansi,Lembaga terkait, serta data olahan dari lingkungan Badan Pusat Statistk RI dan BPS Kalimantan Timur.

3.3. Metode Analisis

Analisis dilakukan secara deskriptif, yaitu terdiri dari tabel silang, grafik, maupun indikator proporsi. Analisis deskriptif antara lain dilakukan untuk memberikan gambaran mengenai kondisi perekonomian, ketenagakerjaan dan dimensi pengangguran. Sementara analisis lainnya digunakan beberapa metode analisis data, yaitu:

1. Analisis *Location Quotient (LQ)* digunakan untuk menentukan sektor basis dan non basis dalam perekonomian wilayah;
2. Analisis *Shift Share* digunakan untuk mengetahui perubahan dan pergeseran sektor perekonomian wilayah,
3. Analisis Tipologi Klassen (Kuadran) digunakan untuk memperoleh klasifikasi pertumbuhan sektor perekonomian wilayah;
4. Analisis Model Rasio Pertumbuhan dan
5. Analisis Indeks Williamson untuk mengetahui distribusi pendapatan

3.3.1 Analisis *Location Question (LQ)*

Sektor basis ekonomi suatu wilayah dapat dianalisis dengan teknik *Location Question (LQ)*, untuk mengetahui seberapa besar tingkat spesialisasi sektor basis. Pada lingkup internasional, suatu sektor dikatakan unggul jika sektor tersebut mampu bersaing dengan sektor yang sama dengan

negara lain. Sedangkan pada lingkup nasional, suatu sektor dapat dikategorikan sebagai sektor unggulan apabila sektor di wilayah tertentu mampu bersaing dengan sektor yang sama yang dihasilkan oleh wilayah lain, baik di pasar nasional ataupun domestik.

Penentuan sektor unggulan menjadi hal yang penting sebagai dasar perencanaan pembangunan daerah sesuai era otonomi daerah saat ini, di mana daerah memiliki kesempatan dan kewenangan untuk membuat kebijakan yang sesuai dengan potensi daerah demi mempercepat pembangunan ekonomi daerah untuk peningkatan kemakmuran masyarakat.

Menurut Rachbini (2001) ada empat syarat agar suatu sektor tertentu menjadi sektor prioritas, yakni (1) sektor tersebut harus menghasilkan produk yang mempunyai permintaan yang cukup besar, sehingga laju pertumbuhan berkembang cepat akibat dari efek permintaan tersebut; (2) karena ada perubahan teknologi yang teradopsi secara kreatif, maka fungsi produksi baru bergeser dengan pengembangan apasitas yang lebih luas; (3) harus terjadi peningkatan investasi kembali dari hasil- hasil produksi sektor yang menjadi prioritas tersebut, baik swasta maupun pemerintah; (4) sektor tersebut harus berkembang, sehingga mampu memberi pengaruh terhadap sektor-sektor lainnya. sektor unggulan (*leading sector*) di suatu daerah/wilayah. Sektor unggulan adalah satu grup sektor/subsektor yang mampu mendorong kegiatan ekonomi dan menciptakan kesejahteraan di suatu daerah terutama melalui produksi, ekspor dan penciptaan lapangan pekerjaan, sehingga identifikasi sektor unggulan sangat penting terutama dalam rangka menentukan prioritas dan perencanaan pembangunan ekonomi di daerah.

Menurut Tarigan (2007), secara matematik, LQ diformulasikan sebagai perbandingan relatif antara kemampuan suatu sektor di daerah yang diamati dengan kemampuan sektor yang sama pada daerah yang lebih luas, yang dapat dihitung dengan rasio berikut :

$$LQ = \frac{Vi_R / V_R}{Vi / V}$$ dimana:

Vi^R = jumlah PDRB suatu sektor kabupaten/kota/sub suatu sektor

V^R = jumlah PDRB seluruh sektor kabupaten/kota/suatu sektor provinsi

V_i = jumlah PDRB suatu sektor tingkat provinsi/sektor provinsi

V = jumlah PDRB Provinsi

Dari perhitungan LQ, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Jika nilai LQ > 1, maka sektor tersebut merupakan sektor basis. Sektor tersebut tidak hanya memenuhi kebutuhan di dalam daerah saja namun juga kebutuhan di luar daerah karena sektor ini sangat potensial untuk dikembangkan.
2. Jika nilai LQ = 1, maka sektor tersebut hanya cukup memenuhi kebutuhan di daerahnya saja.
3. Jika nilai LQ < 1, maka sektor tersebut merupakan sektor non basis dan perlu impor produk dari luar daerah karena sektor ini kurang prospektif untuk dikembangkan.

Analisis LQ memang sangat sederhana dan apabila digunakan dalam bentuk *one-shot analysis* , manfaatnya juga tidak begitu besar, yaitu sekedar melihat apakah LQ berada di atas satu atau tidak. Akan tetapi,analisis LQ dapat memancing analisis lebih lanjut, yaitu misalnya:

1) dilakukan analisis LQ secara berkala (series)
2) dilakukan penghitungan LQ secara rinci sampai pada subsektor-subsektor dalam sektor tertentu, dilakukan analisis LQ untuk daerah tetangga yang menjadi mitra atau mungkin pesaing daerah tersebut, dan lain-lain. Upaya-upaya ini tentu sangat mengandalkan ketersediaan data.

3.3.2 Analisis *Shift-Share*

Pada dasarnya analisis ini membahas hubungan antara pertumbuhan wilayah dan struktur ekonomi wilayah, untuk mengetahui perubahan struktur perekonomian dan pertumbuhan ekonomi di daerah dibandingkan dengan perekonomian daerah yang lebih tinggi digunakan analisis *Shift- Share*.

Analisis *Shift-share Klasik* yang dikembangkan oleh Daniel B. Creamer (1943), adalah suatu metode yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi keunggulan suatu daerah, menganalisis sektor yang menjadi dasar perekonomiannya, dan untuk mengetahui perubahan dan pergeseran sektor pada perekonomian regional maupun lokal sebagai akibat adanya perubahan atau perkembangan ekonomi. Menurut *Shift-share* Klasik, perubahan atau perkembangan ekonomi suatu daerah ditentukan oleh : Pertama, komponen pertumbuhan ekonomi nasional atau *national share* (NS), yang menggambarkan besarnya dampak pertumbuhan ekonomi nasional terhadap perekonomian daerah. Kedua, komponen bauran industri atau *industry mix* (IM) yang menunjukkan tingkat spesialisasi suatu sektor, dalam hal ini tumbuh lebih cepat atau lebih lambat bila dibandingkan dengan perekonomian nasional. Ketiga, komponen *differential shift atau competitive advantage* (CA), yang menunjukkan keunggulan kompetitif suatu sektor.

Hasil analisis *shift-share* mampu memberikan gambaran sebab-sebab terjadi pertumbuhan suatu aktivitas di suatu wilayah. Sebab-sebab yang dimaksud dibagi menjadi tiga bagian yaitu;

(1) sebab yang berasal dari dinamika lokal (sub wilayah)

(2) sebab yang berasal dari dinamika aktivitas sektor (total wilayah

(3) sebab dari dinamika wilayah secara umum.

Gambaran kinerja ini dapat dijelaskan dari tiga komponen hasil analisis, yaitu:

1. Komponen laju pertumbuhan total (komponen *share*). Komponen ini menyatakan pertumbuhan total wilayah pada dua titik waktu yang menunjukkan dinamika total wilayah.
2. Komponen pergeseran proporsional (komponen *proportional shift*). Komponen ini menyatakan pertumbuhan total aktivitas tertentu secara relatif dibandingkan dengan pertumbuhan secara umum dalam total wilayah yang menunjukkan dinamika aktivitas sektor total dalam wilayah.
3. Komponen pergeseran diferensial (komponen *differential shift*). Ukuran ini menjelaskan bagaimana tingkat kompetisi suatu aktivitas tertentu dibandingkan dengan pertumbuhan total aktivitas sektor tersebut dalam wilayah. Komponen ini menggambarkan dinamika suatu aktivitas sektor tertentu di sub wilayah tertentu terhadap aktivitas tersebut di sub wilayah lain.

Persamaan *Shift Share Analysis* adalah sebagai berikut:

$$SSA = \left(\frac{X_{..(t1)}}{X_{..(t0)}} - 1\right) + \left(\frac{X_{i\,(t1)}}{X_{i\,(t0)}} - \frac{X_{..(t1)}}{X_{..(t0)}}\right) + \left(\frac{X_{ij\,(t1)}}{X_{ij\,(t0)}} - \frac{X_{i\,(t1)}}{X_{i\,(t0)}}\right)$$

a b c

Dimana :

a = komponen *share*

b = komponen *Proportional shift*

c = komponen *differential shift*

X.. = nilai total sektor dalam Provinsi

X.i = nilai total sektor tertentu dalam Provinsi

Xij = nilai sektor tertentu dalam kabupaten/kota ke-*i*

3.3.3 Teori Model Rasio Pertumbuhan

Dalam perencanaan wilayah dan kota terutama untuk melihat deskripsi kegiatan ekonomi yang potensial, alat analisis yang sering digunakan antara lain: analisis *Location Quotient* digunakan untuk melihat seberapa besar kontribusi suatu kegiatan dalam wilayah studi dibandingkan dengan wilayah referensinya, dan analisis *Shift–Share* adalah melihat pertumbuhan dari suatu kegiatan terutama melihat perbedaan pertumbuhan, baik dalam skala yang lebih luas (wilayah referensi) maupun skala yang kecil (wilayah studi).

Kedua alat tersebut sangat dibutuhkan untuk melihat deskripsi kegiatan ekonomi wilayah yang potensial, meskipun dalam melakukan analisis dengan kedua alat tersebut harus mempunyai pola yang sama terutama dalam melakukan *overlay*.

Salah satu alternatifnya adalah dengan menggunakan " Model Rasio Pertumbuhan (MRP)". Modifikasi tersebut dilakukan dalam usaha menyamakan bahasa, satuan dan pola dengan analisis *Location Quotient*. Model Rasio Pertumbuhan adalah membandingkan pertumbuhan suatu kegiatan dalam wilayah referensi dan wilayah studi. Dalam analisis tersebut terdapat dua rasio pertumbuhan yaitu :

a. Rasio Pertumbuhan Wilayah Studi (RPs), dengan formulasi matematis yang digunakan adalah :

$$RPs = \frac{DEj / EiR\ (t)}{DEiR / EiR\ (t)}$$

b. Rasio Pertumbuhan Wilayah Referensi (RPr), Formulasi yang digunakan adalah:

$$RPr = \frac{DEiR / EiR (t)}{DER / ER (t)}$$

Dimana :

DEij = Perubahan pendapatan kegiatan I di Kabupaten/Kota pada tahun awal analisis

DER = Perubahan PDRB di Provinsi kaltim

DEiR = Perubahan pendapatan kegiatan sektor I di Provinsi Kaltim

EiR (t) = Perubahan pendapatan kegiatan sektor I di Kabupaten/kota

ER = PDRB wilayah referensi

Pada dasarnya alat analisis ini sama dengan LQ, namun perbedaannya terletak pada kriteria perhitungan dimana LQ menggunakan kriteria distribusi sedangkan MRP menggunakan kriteria pertumbuhan.

Pertumbuhan Wilayah Referensi (RPr), Rasio Pertumbuhan Wilayah Studi (RPs) dan *Location Quotient (LQ)*. Koefisien dari ketiga komponen tersebut kemudian disamakan satuannya dengan diberikan notasi positif (+) yang berarti koefisien komponen bernilai lebih dari satu dan Negatif (-) berarti kurang dari satu. RPR bernotasi positif berarti pertumbuhan sektor i lebih tinggi dibanding pertumbuhan total diwilayah referensi. RPs bernotasi positif berarti pertumbuhan sektor i lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan sektor yang sama di wilayah referensi. Sedangkan LQ bernotasi positif berarti kontribusi sektor i terhadap PDRB di wilayah studi lebih tinggi dibanding kontribusi sektor yang sama terhadap PDRB di wilayah referensi. Ringkasnya dapat dibuat sebagai Tabel berikut.

Tabel 3.3 Keterangan Makna Notasi Dalam Model Rasio Pertumbuhan

Notasi	Keterangan analisis
RPr +	Bermakna bahwa pertumbuhan sektor i lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan total di wilayah referensi.
RPs+	Bermakna bahwa pertumbuhan sektor i lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan sektor yang sama di wilayah referensi.
LQ +	Bermakna bahwa kontribusi sektor i terhadap PDRB di wilayah studi lebih tinggi dibandingkan kontribusi sektor yang sama terhadap PDRB di wilayah referensi

3.3.4 Analisis Tipologi Klassen (Analisis Kuadran)

Alat Analisis Tipologi Klassen digunakan untuk mengetahui gambaran tentang pola dan struktur pertumbuhan ekonomi masing-masing daerah. Tipologi Klassen pada dasarnya membagi daerah berdasarkan dua indikator utama, yaitu pertumbuhan ekonomi daerah dan pendapatan per kapita daerah. Dengan menentukan rata-rata pertumbuhan ekonomi sebagai sumbu vertikal dan rata-rata pendapatan per kapita sebagai sumbu horizontal, daerah yang diamati dapat dibedakan menjadi empat klasifikasi,yaitu: daerah cepat-maju dan cepat-tumbuh,daerah maju tapi tertekan, daerah berkembang cepat, dan daerah relatif tertinggal (Syafrizal, 1997).

Kriteria yang digunakan untuk membagi daerah kabupaten/kota dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Daerah cepat maju dan cepat tumbuh, yaitu daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi dan tingkat pendapatan yang lebih tinggi dibanding rata-rata provinsi.

2. Daerah maju tapi tertekan, yaitu daerah yang memiliki pendapatan perkapita lebih tinggi, tetapi tingkat pertumbuhan ekonominya lebih rendah dibanding dengan rata-rata provinsi.

3. Daerah berkembang adalah yaitu daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan tinggi, tetapi tingkat pendapatan perkapita lebih rendah dibanding rata-rata provinsi.

4. Daerah relatif tertinggal yaitu adalah daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan dan pendapatan perkapita yang lebih rendah dibanding dengan rata-rata provinsi.

Tabel 3.4 Analisis Kuadran

PDRB Perkapita (y) / Laju Pertumbuhan PDRB (r)	$Y_1 > y$	$Y_1 < y$
$R_1 > r$	Daerah cepat maju dan cepat tumbuh	Daerah Berkembang Cepat
$R_1 < r$	Daerah Maju Tapi Tertekan	Daerah Relatif Tertinggal

Keterangan:

Y_1= Pendapatan Perkapita Provinsi A

Y= Pendapatan Perkapita rata-rata Nasional

R_1= Laju Pertumbuhan PDRB Provinsi A

R= Laju Pertumbuhan PDRB rata-rata Nasional

3.3.5 Analisis Indeks Williamson

Menurut Sjafrizal (2012) salah satu model yang cukup representatif untuk mengukur tingkat ketimpangan pembangunan antar wilayah adalah indeks williamson yang dikemukakan oleh Williamson (1965). Williamson mengemukakan model Vw (indeks tertimbang atau *weighted index* terhadap jumlah penduduk) dan Vuw (tidak tertimbang atau *un-weighted index*) untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan per kapita suatu negara pada waktu tertentu. Walaupun indeks ini mempunyai beberapa kelemahan, yaitu antara lain sensitive terhadap definisi wilayah yang digunakan dalam perhitungan, namun demikian indeks ini lazim digunakan dalam mengukur ketimpangan pembangunan antar wilayah (Sjafrizal, 2012). Formulasi Indeks Williamson yang digunakan menurut Sjafrizal (2012) yaitu:

$$cv_w = \frac{\sqrt{\sum(Yi - \bar{y})^2 fi/n}}{\bar{y}}$$

Keterangan:

CV_w = Indeks Williamson

f*i* = Jumlah penduduk kabupaten/kota *i* (jiwa)

n = Jumlah penduduk provinsi i (jiwa)

Yi = PDRB per kapita kabupaten/kota *i* (Rupiah)

$\bar{y}$ = PDRB per kapita rata-rata Provinsi i (Rupiah)